

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kepulauan Kuril yang terletak di sebelah timur laut Pulau Hokaido, Jepang dan di sebelah barat daya Semenanjung Kamchatka, Rusia, itu sejak lama menjadi rebutan antara warga Jepang dan warga Rusia, yang telah menjelajahi pulau-pulau itu sejak akhir periode abad ke 17. Permasalahan sengketa kepemilikan antara Rusia-Jepang di Kepulauan Kuril masih berlanjut sampai sekarang, akan tetapi sampai saat ini baik Rusia maupun Jepang masih sama-sama memegang prinsipnya mengenai kepemilikan kepulauan tersebut, yang sejak berakhirnya Perang Dunia II dikuasai oleh Uni Soviet

Melihat kenyataan diatas dapat kita lihat bahwa sengketa tersebut sangat banyak mempengaruhi mekanisme pemerintahan masing-masing Negara. Khususnya Jepang, dimana telah cukup banyak penandatanganan perjanjian maupun perundingan yang ditetapkan sebagai acuan terhadap kepemilikan Kepulauan Kuril, di sebelah utara Jepang, yang terdiri dari empat pulau, antara lain: Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan Habomai.

Kebijakan pemerintahan Jepang yang dilakukan baik itu pengaruh dalam negeri maupun luar negeri sendiri sangatlah berperan penting terhadap pembangunan di segala bidang. Maka dari itu upaya dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Jepang untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan

Kepulauan Kuril yang masih saja diperdebatkan dengan Rusia dalam kurun waktu 60 tahun terakhir.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi melalui suatu pembahasan dalam bentuk tulisan ilmiah mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan Jepang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Kepulauan Kuril terhadap Rusia beserta faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan adanya perbedaan persepsi terhadap kedua Negara tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Kepulauan Kuril adalah rangkaian lebih dari 56 pulau, mencakup wilayah 15.600 km² dan terletak 2.409 km dari garis pantai. Terbentang 1.200 km antara Hokaido, pulau paling utara Jepang dan Kamchatka Rusia Peninsula (dari 43 – 51 LU).¹

Kelompok kepulauan ini berada di sebelah selatan Semenanjung Kamchatka (Rusia) dan timur laut Siberia serta sebelah utara pulau Hokaido (Jepang). Kepulauan ini memisahkan laut Okhotsk di sebelah barat laut dan Samudra pasifik di sebelah barat daya. Bentuknya memanjang dari Timur laut sampai barat daya, mulai dari selat Kuril antara tanjung Lopatka, Selatan Kamchatka dan pulau Hokaido (Jepang).

Adanya ekspansi Rusia yang dilakukan di Asia telah menambah wilayah Rusia semakin luas sehingga Rusia memiliki suatu wilayah Negara yang terluas di dunia yang membentang dari Eropa hingga pantai Pasifik. Ekspansi tersebut dilakukan melalui jalur darat. Untuk memasuki wilayah Asia timur yang luas itu, pasukan Rusia terlebih dahulu harus berhadapan dengan bangsa Mongol yang akhirnya digunakan sebagai kekuatan baru untuk dapat menembus Asia.

Dari pusat – pusat koloni yang didirikan Rusia di Siberia, para pionir Rusia melakukan ekspansi ke selatan menuju Amur yang kaya gandum. Dari daerah Amur pasukan konflik lagi dengan pasukan Manchu. Akan tetapi kedua bangsa itu dapat menyelesaikan konfliknya secara diplomatik. Mereka melakukan perjanjian tahun 1689 yang dikenal dengan perjanjian *Nerckhins*, suatu perjanjian yang pertama kali dilakukan oleh Tiongkok dengan bangsa Eropa (Rusia). Perjanjian tersebut mengikat kedua Negara selama 169 tahun, perjanjian tersebut menguntungkan Tiongkok karena “kedua sisi sungai Amur tetap dalam pengawasan Tiongkok”. Akibat dari perjanjian itu maka Rusia menunda ekspansinya hampir dua abad lamanya dan segera mengalihkan ekspansinya ke Utara Pasifik yaitu ke Semenanjung Kamchatka.

Semenanjung Kamchatka menjadi jembatan untuk memasuki pulau – pulau di sekitarnya. Ekspansi Rusia ini ternyata bertemu dengan kepentingan Jepang. Untuk menghindari terjadinya konflik antara kedua bangsa, tahun 1855 mereka melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Shimoda.

Perjanjian itu telah menentukan batas kekuasaan masing-masing yaitu dari

Etorofu ke selatan milik Jepang sedang dari Pulau Urup ke utara menjadi milik Rusia, sementara pulau besar Shakalin di bawah kekuasaan bersama.

Sejak Rusia menduduki pulau Shakalin, muncullah konflik antar kedua bangsa itu dan konflik berkelanjutan sebelum dicapai perjanjian Portsmouth tahun 1875, Rusia dan Jepang kemudian menandatangani lagi perjanjian St. Petersburg, yang mana telah disepakati bahwa Jepang harus melepaskan hak-haknya dalam pemilikan bersama Sakhalin dan diganti dengan hak-hak territorial pada Kepulauan Kuril.

Untuk menghubungkan wilayahnya yang sangat luas itu, Rusia membangun Jalan Kereta Api Trans – Siberia yang dapat menghubungkan Eropa dengan Pantai Pasifik.²

Tahun 1894 dunia mengakui bahwa Jepang telah menjelma menjadi Negara modern dan kuat yang kedudukannya boleh dikatakan sederajat dengan Negara-negara besar di Barat. Modernisasi dalam negeri telah dianggapnya cukup dan tidak lagi menarik perhatian bangsa Jepang. Mereka mulai melibatkan diri dalam dunia internasional. Jepang baru yang telah mencapai perkembangan perkembangan industri, perdagangan dan tidak ketinggalan pula perkembangan penduduk ditambah dengan patriotik yang kuat ternyata telah menimbulkan bentrokan – bentrokan dengan Negara- - Negara lain ; misalnya dengan masalah Korea (melibatkan Jepang harus berperang melawan Cina), lalu disusul dengan

² Japanton Sitohang, "Hubungan Rusia Jepang : Dilema Pengembalian Empat Pulau", dalam *Jurnal*

kepulauan itu. Ribuan warga Jepang, yang pernah tinggal disana, dipaksa keluar beberapa saat sebelum akhir Perang Dunia II.

Perdana Menteri (PM) Jepang Junichiro Koizumi dan Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki argumentasi bahwa mereka sepakat untuk meneruskan perundingan setelah tidak berhasil memecahkan kebuntuan selama 60 tahun terakhir atas kepemilikan Kepulauan Kuril yang tepat terletak di sebelah utara Jepang. Mereka juga sepakat untuk membuat perjanjian damai yang akan secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Jepang dan Rusia juga menyerukan diadakannya kerjasama untuk melawan teror, membuka hubungan telepon langsung antara Kepala Negara, dan mengadakan kerjasama untuk membangun jaringan pipa minyak di bagian Timur Rusia.

Kedua Negara tersebut belum mencapai kesepakatan mengenai permasalahan sengketa di kepulauan tersebut. Tetapi disetujui untuk melanjutkan pembicaraan karena kedua Negara bertekad mencapai persetujuan yang akan ditandatangani secara resmi sebagai pernyataan damai terhadap konflik yang sedang terjadi beberapa tahun belakangan ini, serta menginginkan perbaikan kembali struktur hubungan bilateral dalam kerjasama dan pembuatan kebijakan – kebijakan dalam bidang ekonomi dan politik sekaligus dapat mengakhiri perbedaan-perbedaan mengenai terhadapan kepemilikan Kepulauan Kuril

D. Pokok Permasalahan

Melihat latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

“Mengapa Jepang terus melakukan upaya-upaya untuk memperoleh kembali Kepulauan Kuril dan berusaha untuk menyelesaikan sengketa kepulauan tersebut dengan Rusia”?

E. Kerangka Pemikiran (Teori)

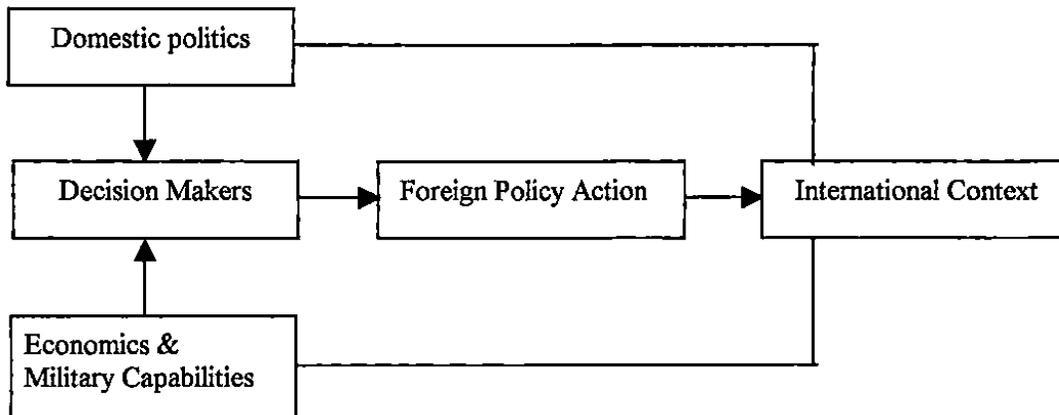
Teori – teori yang digunakan untuk menganalisa tentang Kebijakan Pemerintahan Jepang dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan Kuril adalah **Teori Kebijakan Luar Negeri** (*Decision Making Theory*) dan **Teori Konflik**.

1. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Teori adalah konsep – konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.⁵

Teori Pembuatan Keputusan Luar negeri dikemukakan oleh William D. Coplin. Teori ini berasumsi bahwa tindakan politik luar negeri dibuat oleh pembuat keputusan (*Decision Making*). Para pembuat keputusan dalam proses pembuatannya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu politik dalam negeri, situasi ekonomi dan keamanan. Namun perlu diingat bahwa *Domestic Policy* serta *Economic Military Conditions* ini dipengaruhi oleh *International Context*.

Untuk lebih jelasnya teori pembuatan keputusan digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR.1.1
Proses Pembuatan Keputusan Luar Negeri

Sumber : **WD Coplin dan Charles W.Kegley** : *Multy Method Introduction International Politics*

Pembuatan Keputusan Luar Negeri ini, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1). *Domestic Politics (Politik Dalam Negeri)*

Keadaan politik dalam negeri dipengaruhi oleh tuntutan yang sedang terjadi atau berlangsung di dalam negeri. Bangsa Jepang merupakan bangsa yang homogen karena adanya campur tangan pemerintah, maka timbullah sikap persamaan antara elit dengan masyarakat biasa. Hal ini memunculkan sikap rasa memiliki terhadap negaranya yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan ambisi bahwa dalam suatu hubungan internasional pastilah ada Negara yang memimpin.

Selain itu kondisi politik dalam negeri di Jepang dipengaruhi oleh

keberadaan “Segitiga Besi” atau *Japan Incorporated (Japan Inc.)* yaitu pemimpin bisnis, birokrasi pemerintah dan kelompok politisi. Ketiga kelompok itu memiliki jaringan hubungan internasional yang sangat ketat dalam pengambilan keputusan.

Di dalam negeri Jepang sendiri arti penting Kepulauan Kuril tersebut sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan – kebijakan dalam bidang ekonomi dan politik dalam negeri, seperti hasil investasi dari kegiatan nelayan di sebagian besar penduduk di kepulauan tersebut memiliki pengaruh dalam pertumbuhan pangsa pasar perekonomiannya, pasca Perang Dunia II Rusia sempat merebut hasil – hasil tersebut sebagai pemasukan dalam negerinya karena dirasa belum ada pengakuan resmi yang ditetapkan antara kedua Negara. Dalam pengambilan keputusan mengenai sengketa tersebut Jepang sendiri menegaskan bahwa pulau – pulau tersebut merupakan wilayah utara kepulauannya. Kepentingan ekonomi Jepang di Kepulauan Kuril di samping kebutuhan terhadap sumber – sumber alam yang berguna untuk kepentingan industrinya juga untuk menambah ruang gerak nelayan – nelayan Jepang ke utara.

2). *Economic Military Capabilities* (Kemampuan Ekonomi dan Militer)

Kemampuan ekonomi dan militer dipengaruhi oleh sistem pertahanan. Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada kemampuan suatu Negara dalam mempengaruhi keputusan politik luar negeri. Kemampuan

ekonomi yang besar, maka suatu Negara akan memiliki power yang besar pula dalam melaksanakan politik luar negerinya sekaligus ia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri lain. Dalam kata lain ekonomi merupakan salah satu kekuatan yang bersifat *Pressure* bagi Negara lain. Kondisi ekonomi Jepang saat ini dimana Jepang sangat dominan dalam hal ekonomi, ini membuat Jepang sebagai Negara kuat dan memiliki kemampuan militer yang akan memberikan suatu kepercayaan tersendiri pada suatu pemerintah bahwa kemampuannya dalam mempertahankan diri dari ancaman pertahanan keamanan terhadap negaranya yang kuat, termasuk ancaman yang berasal dari gangguan akibat politik luar negerinya. Dalam bidang militer dan pertahanan, Jepang berusaha memperkuat posisinya dengan meminta dukungan Inggris, yang juga menentang sikap keras Rusia dengan keberhasilannya melakukan penetrasi di Tiongkok yang memperoleh konsesi serta disetujuinya Perjanjian Aigun terhadap kawasan Kepulauan Kuril, sehingga terciptalah Aliansi Inggris – Jepang pada tahun 1902.

3). *International Context*

Merupakan kegiatan internasional yang sedang berlangsung yang mempengaruhi situasi ekonomi dan militer serta kondisi dalam negeri.

Merupakan kegiatan internasional yang terjadi di berbagai

Proses pembuatan keputusan luar negeri sangat memperhatikan faktor ini karena merupakan suatu ukuran yang akan menjadi pertimbangan yang digunakan oleh para pembuat keputusan. Hal ini terkait dengan penyesuaian sikap Negara dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan internasional. Jika keadaannya damai maka keputusan yang diambil pun bersifat kooperatif, namun jika keadaannya tidak stabil karena adanya gangguan, maka keputusannya cenderung akan bersifat mempertahankan diri atau mencari dukungan dari Negara lain.

Seperti halnya Jepang yang sedang menghadapi konflik dengan Rusia terhadap kepemilikan Kepulauan Kuril dalam kurun waktu 60 tahun terakhir yang belum menemukan jalan keluar, dimana kedua belah pihak Negara telah membuat beberapa pernyataan maupun perjanjian yang memuat prinsip – prinsip ideologi kedua Negara tersebut. Keputusan yang dihasilkan pun beragam, sehingga Jepang sendiri merasa kurang simpatik terhadap Rusia dikarenakan kondisi pemerintahannya saat itu tidak stabil, Rusia mengalami perpecahan dari tubuh Uni Soviet yang mengakibatkan berbagai keputusan yang diambil tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Jepang. Konflik bermula sejak Jepang beranggapan bahwa deklarasi perang Uni Soviet dalam Perang Dunia II, maupun pelanggaran Pakta non agresi selama 5 tahun. Dimana

... dan Uni Soviet telah menandatangani Pakta non

agresi pada tahun 1941, serta saling mengakui kedaulatan dan Integrasi wilayah masing – masing.

2. Teori Konflik

Konflik secara konseptual dimaksudkan sebagai perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak, yang dapat merupakan dua orang atau bahkan golongan besar seperti Negara. Kadang – kadang konflik digunakan untuk menyebut pertentangan antara pandangan dan perasaan seseorang (Psikologis ; percekcoakan ; bentrokan).⁶

Sedangkan penyebab terjadinya konflik disebutkan oleh Steven L. Spiegel yaitu : *Conflict is produced by a clash of culture, a disharmony of interest, a disparity of perception, all of which result mobility of the parties to accept separately and together the environment they live in.*⁷ “Konflik ditimbulkan oleh bentrokan kebudayaan, ketidakharmonisan kepentingan, kesenjangan persepsi yang semuanya itu mengakibatkan pergeseran/mobilitas semua pihak, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama, dalam menerima lingkungan yang mereka sepakati”.

Teori konflik dari Coser’s berbunyi : “Jika suatu Negara ingin mencapai sasaran yang menjadi kepentingannya, maka ia akan berupaya

⁶ DN Machur, S.H. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h.341

untuk menetralkan kerugian ataupun menyingkirkan lawan yang menjadi saingannya.⁸

Dari pendapat – pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa konflik adalah suatu gejala sosial di dalam suatu masyarakat, yang terjadi karena perbedaan kepentingan dari kelompok – kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Karena adanya berbagai perbedaan tersebut maka setiap kelompok akan berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang kuat agar dapat mengalahkan kelompok lain atau paling tidak mengurangi pengaruh dari kelompok lain di dalam masyarakat.

Menurut Frankel, konflik tidak dapat dipisahkan dari suatu kerjasama, begitu pula kerjasama tidak bisa dipisahkan dari konflik. Kerjasama yang dilakukan oleh aktor – aktor Internasional terkadang sering menimbulkan persaingan diantara aktor – aktor yang bersangkutan. Persaingan di sini maksudnya adalah konflik ada, tetapi tidak mutlak karena konflik itu dilunakkan oleh sedikit kepentingan masyarakat dan sering berakhir dengan kompromi. Menurut Thomas Schelling yang dikutip oleh Frankel :⁹

“Kemenangan dalam konflik tidak bersifat persaingan semata – mata dan tidak perlu mengorbankan pihak lain. Situasi – situasi konflik sekarang pada dasarnya adalah suatu tawar – menawar, karena situasi

⁸ James E Daugherty and Robert L. Pfalzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations*, Harper Collins Publisher, Inc., 1996, p.187.

⁹ Thomas Schelling, *Arms and Influence*, Alih Bahasa oleh Leila H. Harjini, Sunamb Bersaudara

tersebut menggabungkan penyimpangan kepentingan dengan kepentingan bersama yang lebih berkuasa bahwa pemecahannya tidak akan merusak kedua belah pihak, keberhasilannya berarti pengelakan perang.”

Konflik merupakan fenomena sosial dalam masyarakat yang dapat ditimbulkan sebagai akibat interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu lainnya, antar kelompok, antar etnis, bahkan antar Negara. Dalam hal ini kehidupan masyarakat yang dinamis timbul juga konflik sosial adalah suatu gejala yang wajar. Tidak ada satu masyarakat pun yang dalam proses perkembangannya tidak mengalami adanya konflik sosial. Hal itu disebabkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terus menerus hidup dalam suatu keteraturan dan ketertiban yang abadi.

Soerjono Soekanto menyatakan sebab – sebab timbulnya konflik dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁰ *Pertama*, perbedaan antara individu – individu. Perbedaan pendirian sikap dan perasaan mungkin melahirkan bentrokan antar mereka. *Kedua*, perbedaan kebudayaan. Setiap kelompok masyarakat tidak lepas dari pola – pola yang menjadi latar belakang pembentuk serta perkembangan kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Perbedaan itu baik disebabkan oleh perbedaan fisik maupun lingkungan sosial budayanya. *Ketiga*, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Pustaka Baru, Jakarta, 1990, hal.107-108

menyangkut kepentingan ekonomi, politik dan sebagainya. *Keempat*, perubahan sosial. Perubahan sosial yang begitu pesat apalagi di era globalisasi ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap nilai – nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat tersebut ada yang siap menerima perubahan. Akibat ketidaksiapan itu dapat saja memicu konflik dalam masyarakat.

Istilah konflik biasanya mengacu pada kondisi dimana suatu kelompok manusia (baik etnis, bahasa, budaya, agama, social, ekonomi, politik dan sebagainya) terlibat dalam pertentangan secara sadar dan satu atau lebih kelompok manusia lainnya karena kelompok ini mengejar atau mempunyai perbedaan sasaran.

Dari beberapa uraian teori konflik di atas dapat menjelaskan bahwa adanya sengketa terhadap Kepulauan Kuril yang diperdebatkan antara Jepang dan Rusia tersebut mengklaim bahwa pulau itu merupakan bagian dari wilayah kedua Negara. Adanya perbedaan persepsi antara Jepang dan Rusia di dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril. Pulau – pulau utara ini telah diduduki oleh Uni Soviet semenjak akhir perang dunia II. Konflik bermula sejak Jepang menganggap bahwa deklarasi perang Uni Soviet terhadap Jepang dalam Perang Dunia II, telah melanggar Pakta non Agresi

antara Jepang dan Uni Soviet. Dikawatirkan, sengketa Kepulauan Kuril antara Jepang dan Uni Soviet telah

menandatangani Pakta non Agresi pada tahun 1941, serta saling mengakui kedaulatan dan integrasi wilayah masing – masing.

Secara historis batas antara Jepang dan Uni Soviet ditetapkan antara pulau Etorofu dan pulau Urip, dalam pantai Kepulauan Kuril sedangkan Sakalin dikuasai bersama (seperti dalam perjanjian Shimoda pada tahun 1855). Kemudian saat ditandatanganinya perjanjian St. Petersburg pada tahun 1875, Jepang menyerahkan haknya atas Kepulauan Kuril. Namun setelah perang Jepang – Rusia 1904 – 1905, Kepulauan Shakalin tersebut berhasil dikuasai Jepang sehingga sebelum meletusnya Perang Dunia II, seluruh Kepulauan Kuril, Shikotan, Hotomai dan Shakalin Selatan merupakan wilayah yang dikuasai Jepang.

Namun pada saat Perang Dunia II, Rusia kemudian mengklaim dan memasukkan Kepulauan Kuril tersebut dalam federasi Rusia, setelah mendudukinya pada tahun 1947 dan mulai mengusir penduduk Jepang pada tahun 1949, serta menganggap Kunashiri dan Etorofu merupakan bagian dari Kepulauan Kuril. Pengambilan dari keputusan ini dianggap Jepang tidak sah karena diambil dengan jalan kekerasan, seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Postdam (saat menyerahnya Jepang) bukan merupakan persetujuan Internasional dimana bagi Uni Soviet perjanjian – perjanjian tersebut

dengan bekerjasama dengan Jepang akan tetapi masih terganjal dengan masalah kepulauan Kuril.

F. Hipotesa

Jepang terus melakukan upaya-upaya pengembalian Kepulauan Kuril, karena :

1. LDP terus mengkampanyekan pengembalian Kepulauan Kuril untuk perbaikan struktur kepentingan politik dalam negeri Jepang.
2. Kepulauan Kuril berpotensi sebagai barisan pertahanan keamanan militer , serta sebagai salah satu penghasil sumber produksi pangan bagi Jepang
3. Keinginan Jepang untuk memperbaiki hubungan diplomatik bilateral dengan Rusia.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penulisan ini ditekankan pada peristiwa – peristiwa dimana Jepang menghadapi perdebatan dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, yang pada waktu tersebut terlibat hubungan yang kurang harmonis dengan Rusia, diakibatkan oleh adanya kepentingan yang sama terhadap kepemilikan Kepulauan Kuril, dimana pulau tersebut menimbulkan interaksi konflik antar Negara. Penyelesaian sengketa teritorial tersebut mengakibatkan Jepang harus sering mengambil kebijakan serta sejumlah perjanjian untuk mengatasi kondisi hubungan bilateral dengan Rusia yang dirasa kurang sesuai

H. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian bersifat diskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan menganalisa permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan mencari berbagai informasi, berita analisis, konsep – konsep hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal politik serta informasi dari internet. Data juga didapatkan dari lembaga – lembaga pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.

I. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang didalamnya akan membahas mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Membahas sengketa Jepang dan Rusia di Kepulauan Kuril dilihat dari sejarah terjadinya, periode tahun beserta latar belakang sengketa kepulauan tersebut, meliputi letak geografis, kekayaan alam baik yang terdapat di perairan dan daratan Kepulauan Kuril.

Bab III : Membahas mengenai klaim antara Jepang dan Rusia atas Kepulauan Kuril yang membahas dengan beberapa perjanjian, deklarasi, persetujuan beserta manfaat nilai strategis bagi Rusia di bidang

Bab IV : Membahas tentang kebijakan pemerintahan Jepang dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Kuril meliputi faktor-faktor politik dalam negeri, politik luar negeri beserta situasi internasional yang mempengaruhi di bidang ekonomi dan militer bagi Jepang dan Rusia dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril.

Bab V : Disusun berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan